

# PEREMPUAN DAN KEMISKINAN<sup>1</sup>

Indraswari<sup>2</sup>

## Abstract

*INEQUITABLE gender relation and discrimination against women have put Indonesian women to the poorest group. This argument is supported by both quantitative and life condition analysis of women's position in the family. The focus is on the fulfillment of ten basic rights and four dimensions of women's poverty on the word of World Bank. Two implications of the result: first, poverty alleviation policy should sensitive toward gender relation and discrimination against women among the society; secondly, gender categorization on data recording method should be applied on national, regional, and local survey.*

**(Keywords):** Poverty, Gender relation, Women's position)

## Pendahuluan

**K**EMISKINAN adalah fenomena multi dimensional. Oleh sebab itu, masalah kemiskinan harus didekati dari berbagai aspek, termasuk di antaranya aspek gender. Hal ini perlu dilakukan karena laki-laki dan perempuan mengalami kemiskinan secara berbeda dan memiliki kapasitas berbeda untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Perbedaan tersebut lahir dari ketimpangan gender yang berpadu dengan ketimpangan-ketimpangan lain yang dialami kelompok miskin. Semua ini melahirkan situasi yang

membuat perempuan adalah kelompok termiskin di antara orang miskin,.

Pendekatan non-ekonomi terhadap kemiskinan lahir sebagai kritik terhadap dominannya pendekatan ekonomi dalam wacana kemiskinan sebagaimana diungkapkan Kabeer (2003:74):

- 1) *People meet their survival needs not only through monetary income but through a variety of resources – including subsistence production, access to common property resources and state provision of services;*

<sup>1)</sup> Dipresentasikan dalam lokakarya “Konsensus atau Keberagaman? Upaya Meninjau Ulang Kriteria Kemiskinan di Indonesia”, yang diselenggarakan Yayasan Akatiga, di Jakarta 28 Agustus 2008.

<sup>3)</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, email: indras@home.unpar.ac.id .

- 2) *People also have 'stocks' of assets, stores and claims;*
- 3) *The well being of human beings, and what matters to them, does not only depend on their purchasing power but on other less tangible aspect, such as dignity and self-respect.*

Pemerintah Indonesia dalam Dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) mendefinisikan kemiskinan dari sudut pandang pemenuhan hak dasar yaitu "*Kondisi seseorang dan sekelompok orang (perempuan dan laki-laki) yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat*". Diagnosa umum penyebab kemiskinan adalah kegagalan pemenuhan hak-hak dasar yaitu:

1. Terbatasnya kecukupan pangan dan mutu pangan
2. Terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha
5. Terbatasnya akses layanan perumahan
6. Terbatasnya akses terhadap air bersih/aman dan sanitasi
7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah
8. Memburuknya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup
9. Lemahnya perlindungan/jaminan hak atas rasa aman

10. Lemahnya akses partisipasi masyarakat miskin

(Royat, 2008)

Dari sisi gender, World Bank (2003:1) mengidentifikasi empat dimensi kemiskinan yaitu *women's lack of empowerment, opportunity, capacity, security*.

Pemenuhan ke-10 hak dasar dan keempat dimensi World Bank akan menjadi pokok bahasan makalah ini, dilengkapi dengan data kuantitatif di tingkat makro dan data kualitatif di tingkat mikro berupa studi kasus potret perempuan miskin.

## **Terbatasnya Pemberdayaan Perempuan**

Masalah pemberdayaan perempuan meliputi dua hal. Pertama, pemberdayaan ekonomi yang terkait dengan minim/lemahnya akses perempuan terhadap institusi keuangan formal. Kedua, masalah pemberdayaan juga terkait dengan minim/lemahnya suara perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional dan regional.

Berbagai kajian tentang kemiskinan menunjukkan minimnya akses kelompok miskin terhadap institusi keuangan formal terutama dalam hal akses terhadap fasilitas kredit perbankan. Minimnya akses tersebut terkait kesulitan yang dihadapi kelompok miskin dalam penyediaan jaminan sebagai salah satu syarat mendapatkan pinjaman perbankan.

Dalam perbandingan relatif dengan laki-laki, perempuan miskin menghadapi kendala lebih besar dalam hal akses terhadap kredit perbankan (Tsai 1998, Ardener 1964, Indraswari 2006) karena pemilikan aset yang dapat dijadikan jaminan lebih sering

diasnamakan laki-laki. Keterbatasan akses perempuan terhadap pekerjaan di sektor formal juga mempersempit peluang perempuan mengakses kredit perbankan. Bekerja di sektor formal dengan penghasilan tetap adalah syarat lain yang diterapkan institusi keuangan formal dalam menilai kelayakan calon debitur. Hal ini sulit dipenuhi oleh perempuan miskin. Untuk itu, perlu dilakukan terobosan sebagaimana yang telah dilakukan Grameen Bank yang diprakarsai Mohamad Yunus, pemenang Hadiah Nobel, di Bangladesh yang membuka akses perempuan miskin terhadap bantuan dana perbankan.

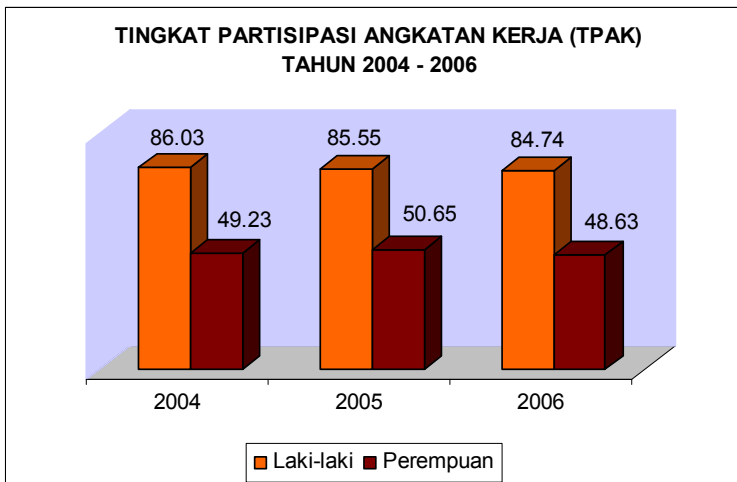
Lemahnya suara perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional dan regional terkait langsung dengan minimnya jumlah perempuan dalam jajaran pembuat keputusan. Meskipun jumlah penduduk perempuan relatif sebanding dengan laki-laki, perempuan adalah kelompok minoritas

dalam jajaran pengambil keputusan. Di tingkat nasional, persentase perempuan dalam lembaga legislatif hanya 11,27% (KPP dan BPS, 2007). Di tingkat provinsi, persentase perempuan di lembaga legislatif berkisar dari persentase terendah 0,1% di Provinsi Maluku Utara hingga persentase tertinggi 17,8% di Provinsi Sulawesi Utara (*ibid*). Melalui kebijakan kuota minimal 30% kursi bagi perempuan di parlemen diharapkan suara perempuan akan lebih didengar. Angka 30% dianggap sebagai “critical mass” dan disepakati sebagai jumlah minimal agar kepentingan perempuan lebih diakomodasikan dalam kebijakan publik.

### Terbatasnya Kesempatan Perempuan

Ada ketidaksamaan posisi laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja

Grafik 1.



Sumber: BPS, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2004, Februari 2005, dan Februari 2006*<sup>3</sup>

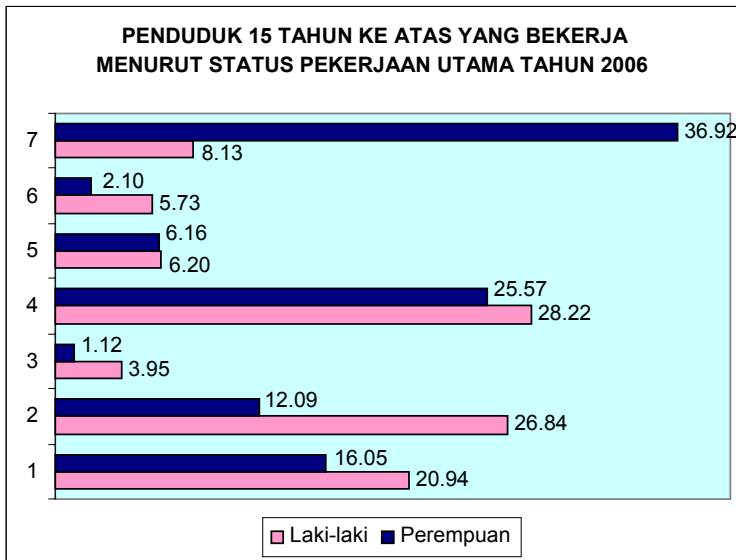
<sup>3</sup>) Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Statistik Gender, <http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=list&id=gender>

dan status pekerjaan utama sebagaimana terlihat dalam grafik 1 dan 2 di bawah ini. Grafik 1 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dan perempuan menduduki persentase terbesar (36,92) dalam status pekerja yang tidak dibayar (grafik 2).

Di sektor publik, pekerja perempuan masih pula menghadapi diskriminasi dalam hal pengupahan. Rata-rata pekerja perempuan hanya mendapat upah 70% pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Diskriminasi upah dilakukan secara terbuka

atau terselubung. Dalam diskriminasi terbuka, laki-laki dan perempuan mendapat upah pokok yang berbeda untuk pekerjaan yang sama. Diskriminasi terselubung dilakukan melalui perbedaan pembayaran komponen tunjangan seperti tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan. Pekerja laki-laki yang berstatus menikah mendapat tunjangan keluarga (istri dan anak) dan tunjangan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya. Sedangkan pekerja perempuan yang berstatus menikah tetap dianggap lajang dan tidak mendapat tunjangan keluarga

**Grafik 2.**



Keterangan Gambar:

1. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain
2. Berusaha dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap
3. Berusaha dengan buruh tetap
4. Pekerja/buruh/karyawan
5. Pekerja bebas di pertanian
6. Pekerja bebas di non-pertanian
7. Pekerja tidak dibayar

Sumber<sup>4)</sup>: BPS, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Februari 2006*

<sup>4)</sup> Ibid

serta mendapat tunjangan kesehatan hanya untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, total penghasilan perempuan lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama.

### Terbatasnya Kapasitas Perempuan

Kapasitas perempuan antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan derajat kesehatan mereka. Dalam kedua bidang tersebut masih terjadi ketimpangan gender sebagaimana terlihat dalam grafik 3 bahwa persentase perempuan buta huruf dua kali lipat bahkan lebih dibandingkan laki-laki. Data tersebut mengisyaratkan pendidikan bagi anak perempuan masih dianggap tidak sepenting pendidikan bagi anak laki-laki.

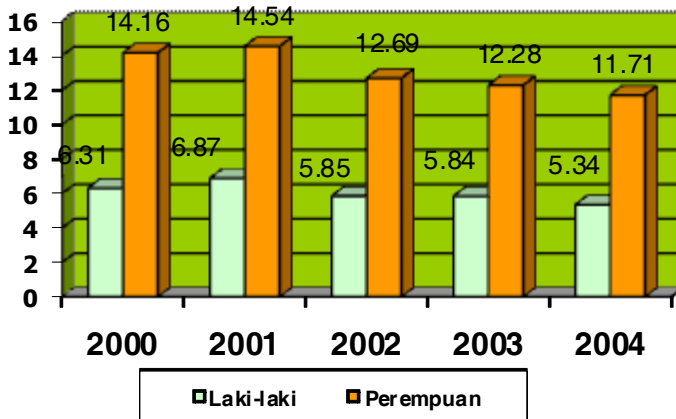
Bagi kelompok miskin, pendidikan tidak menjadi prioritas utama. Namun bagi

perempuan miskin, pendidikan menjadi lebih tidak diprioritaskan. Jika dalam sebuah keluarga miskin tersisa sejumlah dana pendidikan, besar kemungkinan dana yang terbatas tersebut akan digunakan untuk membiayai pendidikan anak laki-laki. Selain itu, tenaga anak perempuan sering kali dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan domestik – termasuk pengasuhan anak – bersama ibu mereka.

Demikian pula dalam hal kesehatan, masih ada ketimpangan akses perempuan terhadap sarana kesehatan yang memadai. Ketimpangan tersebut tercermin dari masih tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI) yaitu 307/100.000 kelahiran hidup dan merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara. Ada berbagai faktor penyebab tingginya AKI, salah satu di antaranya

Grafik 3.

#### PERSENTASE PENDUDUK BUTA HURUF USIA 10 TAHUN KE ATAS TAHUN 2000-2004



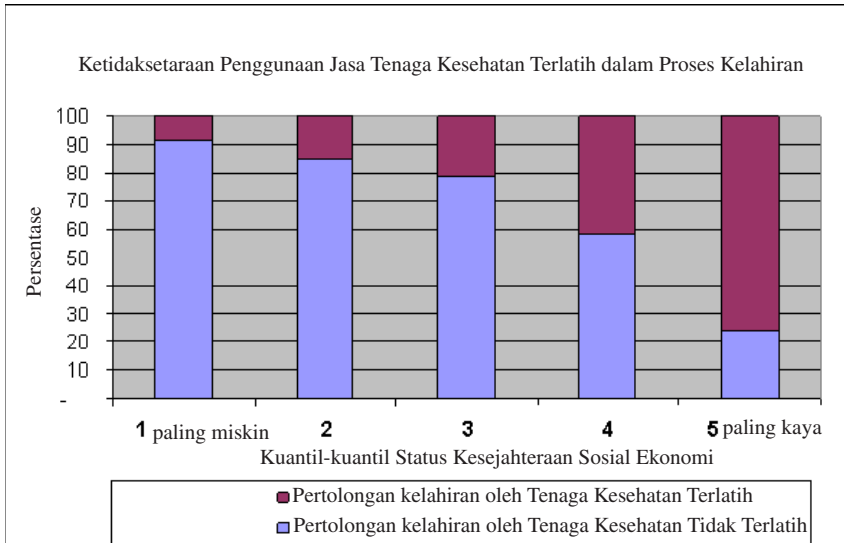
Sumber<sup>5</sup> : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2000 – 2004

<sup>5</sup>) Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Statistik Gender, <http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=list&id=gender>

adalah proses melahirkan yang tidak didampingi tenaga kesehatan terlatih. Studi USAID sebagaimana tampak dalam grafik 4 memperlihatkan hubungan erat antara tingkat kemiskinan dengan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Grafik

kat 62% menjadi 5.163 kasus, tahun 2003 meningkat 51% menjadi 7.787 kasus, tahun 2004 meningkat 80% menjadi 14.020 kasus, dan tahun 2005 meningkat 45% yaitu 20.391 kasus. Dari jumlah tersebut, 82% adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga.

**Grafik 4.**



Sumber: USAID

tersebut menunjukkan semakin miskin seorang perempuan semakin kecil peluangnya mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan terlatih pada saat melahirkan.

### Terbatasnya Keamanan Perempuan

Perempuan (dan anak) adalah kelompok yang rentan dari tindak kekerasan baik yang terjadi di sektor publik maupun sektor domestik. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat pada tahun 2001 terjadi 3.169 kasus kekerasan terhadap perempuan, tahun 2002 mening-

Kekerasan terhadap perempuan terjadi lintas kelas dan tidak selalu terdapat korelasi antara kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan. Namun, disinyalir kemiskinan bisa menjadi salah satu faktor pencetus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban utama perempuan dan anak.

### Studi Kasus: Potret Perempuan Miskin

Berikut ini akan ditampilkan tiga kasus yang menunjukkan potret perempuan miskin dan analisis bagaimana ketimpangan gender memperparah kemiskinan mereka.

### ***Kasus 1: Mak Eros<sup>6</sup>***

Suatu hari sekitar pukul 10.00, Nyonya Eros (58) tergeletak kelelahan di sebuah teras rumah warga Desa Citeko, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dagangan makanan tradisionalnya yang belum laku, seperti kolak pisang dan agar-agar, dibiarkan teronggok di sampingnya.

Sekitar pukul 01.00 dini harinya ia baru saja melahirkan anak ke-10, ujar Ny. Hj Susi SLN (35), warga Citeko. Namun beberapa jam setelah bersalin, ia sudah harus mengambil panganan di rumah Hj. Cicoh (50), pembuat makanan tradisional di Desa Citeko. Seperti pekerjaan sehari-harinya ketika sedang hamil, Eros pun kemudian menjajakan makanan itu ke pelosok kampung di sentra keramik dan genteng Plered.

“Kala tidak begitu, darimana saya membiayai makan anak-anak sebab penghasilan dari suami tidak mencukupi”, ujar Eros. Suaminya, Asep (60), mencari nafkah sebagai tukang becak yang penghasilannya rata-rata sehari Rp 5.000,00, sementara keluarga Eros memerlukan uang untuk membeli lima liter beras sehari Rp 15.000,00. Lauknya cukup kecap atau kerupuk yang diaduk dengan nasi. [terbatasnya kecukupan dan mutu pangan]“Kecap, kan, masih ada gizinya karena terbuat dari kacang kedelai”, ujarnya polos.

Tiada hari libur bagi Eros karena penghasilan baik air di daun talas. Perolehan hari itu habis hari itu juga. Itu pun kalau tidak ada yang *ngutang*. Karena itu, pada kondisi hamil hingga melahirkan anak ke 25 tiga tahun lalu ia tetap menjalankan tugas

hariannya menjajakan makanan, terutama untuk kuli harian [terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha].

Ketika punya anak ketujuh, Eros mengikuti anjuran seorang mantri ikut keluarga berencana. Ia pun disuntik KB setelah kurang cocok dengan pil KB. Namun, upaya KB itu malah membuat badannya sakit, yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan aktivitas berdagang. Lalu ia harus berobat ke Puskesmas, dan itu pun berarti harus mengeluarkan biaya untuk membeli obat penahan rasa sakit. [terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan/KB]

“Masuk KB malah menjadi sakit” katanya. Akibatnya, selain harus keluar uang, Eros juga kehilangan kesempatan memperoleh uang. Ia berhenti KB karena KB malah menjadi beban tambahan.

Dari berjualan makanan itu ia bisa memperoleh penghasilan Rp 15.000,00 sehari. Syaratnya, dagangan yang terdiri atas 100 biji papais (makanan khas Sunda), pisang coklat, kolak pisang, dan agar-agar seharga Rp 500,00 perbuah harus laku semua. Eros mendapat keuntungan Rp 100,00 dari setiap makanan tradisional yang terjual. Kalau tidak laku, makanan itu boleh dikembalikan karena ia tidak bermodal.

Untuk menambah penghasilan, Eros membawa ikan asin mentah di antara dagangan matangnya. “Modal Rp 300.000,00 dari Hj. Susi.” Ujarnya. Ikan asin itu dijual untuk para kuli harian perempuan yang tidak sempat belanja untuk makan keluarganya.

Sebelum berdagang, Eros harus memandikan anak-anaknya, misalnya, tujuh

<sup>6</sup> Uraian kasus ini bersumber dari tulisan Muhtadi, 2006 (diringkas). Keterangan singkat di dalam tanda kurung [ ] ditambahkan oleh penulis.

anak sekaligus. Satu persatu anak-anak itu dibariskan lalu dibasahi dan diberi sabun colek mulai dari rambut hingga kaki. “Sabun mandi harganya mahal”, ujarnya. Kalau kebetulan ada sayuran mentah (biasanya kangkung pemberian tetangga), ia memasak dulu. Kangkung itu diiris, persis seperti seorang gembala memberi makan bebek [beban ganda perempuan].

Kini perempuan perkasa itu harus menanggung 18 orang di rumah sempit yang atap biliknya bergelombang sebagai tanda sudah akan runtuh. Sebagian anaknya ada yang sudah menikah dan masih tinggal di rumah itu. Rumahnya yang berukuran 5X6 m dengan satu kamar terletak di gang sempit nan kumuh [terbatasnya akses layanan perumahan]. Karena itu, keluarga besar tersebut sering tidur *ngampar* di tengah rumah.

Anggota keluarganya terus bertambah setelah kelahiran sang cucu sehingga rumah itu diisi 4 keluarga, yakni anaknya yang sudah menikah, termasuk di antaranya 6 cucu yang juga tinggal di rumah tersebut.

Dari 25 anak yang dilahirkan yang terus lahir hidup hingga dewasa 18 anak. Yang lainnya meninggal pada usia balita antara 2-5 tahun. Kemungkinannya gizi buruk karena makanan mereka sebagian besar hanya kerupuk. Ketika ia berdagang, anak-anak bayinya dijaga oleh kakak-kakaknya atau anak-anaknya yang lebih tua. Saat bayi itu menangis, biasanya hanya diberi air teh manis atau air putih, yakni air tanah yang dimasak sendiri.

Hanya anak ke-12 yang berhasil men-

capai pendidikan kelas VI SD. Sekolah anak-anaknya berhenti rata-rata kelas III SD. [terbatasnya akses layanan pendidikan] Pokoknya kalau sudah bisa baca tulis, anak itu berhenti sekolah untuk digantikan oleh adiknya. Pada awal tahun ajaran baru, pertengahan Juli 2008, anak-anak yang masih duduk di SD tidak berani masuk sekolah pada hari Jumat dan Sabtu. “Mereka malu karena belum punya seragam pramuka”, kata Eros menerangkan.

Si Cikal (anak pertama), Ani Sumarni (25), sudah menjadi janda beranak satu dari suami keduanya yang bekerja sebagai kuli harian. Anak semata wayang Sumarni yang berusia dua tahun menambah jumlah anggota keluarga besar Eros karena tidak diurus bapaknya. Sumarni mencoba peruntungan ke Arab Saudi menjadi TKW.

“Tapi, jangankan mengirim uang, kabar pun sudah dua tahun tidak saya peroleh”, ujarnya sambil terisak meratapi nasib.

### ***Kasus 2: Ibu Reno***<sup>7</sup>

Ibu Reno adalah orang tua tunggal dengan sembilan anak berusia antara 5-30 tahun sebagai berikut:

- Anak pertama: perempuan, tamat kelas 2 SMP, menikah, memiliki satu anak, tinggal terpisah.
- Anak kedua: perempuan, tamat SD, janda cerai, memiliki satu anak, tinggal dengan Ibu Reno, bercerai karena KDRT [*women's lack of security*].
- Anak ketiga: perempuan, tamat SD, menikah, tinggal terpisah.

<sup>7)</sup> Bukan nama sebenarnya. Uraian kasus ini bersumber dari Indraswari, 2006:237-240, keterangan singkat dalam tanda kurung [ ] ditambahkan oleh penulis khusus untuk makalah ini.



- Anak keempat: laki-laki, lajang, tamat SD, penggali sumur, tinggal dengan Ibu Reno.
- Anak kelima: laki-laki, lajang, tamat SD, tukang becak, tinggal dengan Ibu Reno.
- Anak keenam: laki-laki, lajang, tamat SD, penjual koran, tinggal dengan Ibu Reno.
- Anak ketujuh: laki-laki, masih sekolah di kelas 5 SD, tinggal dengan Ibu Reno.
- Anak kedelapan: laki-laki, masih sekolah di kelas 3 SD, tinggal dengan Ibu Reno.
- Anak kesembilan: laki-laki, lima tahun, tinggal dengan Ibu Reno.

[tingkat pendidikan semua anak mencerminkan terbatasnya akses terhadap dan mutu layanan pendidikan]

Dengan demikian terdapat sembilan orang dari tiga generasi tinggal di rumah berukuran 7,5 m<sup>2</sup>, atau 0,83 m<sup>2</sup> perorang [terbatasnya akses layanan perumahan]. Area ini tidak termasuk sarana MCK dan dapur yang digunakan bersama dengan dua tetangga lain. MCK dilengkapi dengan sumur manual yang menghasilkan air berwarna coklat tua yang digunakan untuk mencuci dan mandi [terbatasnya akses terhadap air bersih/aman dan sanitasi]. Kebutuhan air minum dipenuhi dari adik Ibu Reno yang tinggal berdekatan yang “mensubsidi” keluarga Ibu Reno dengan air PAM tanpa memungut biaya. Dalam hal akses terhadap air, Ibu Reno dapat dianggap “cukup beruntung” dibandingkan sebagian tetangga sekitar yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap air sumur maupun air pipa, dan sepenuhnya bergantung kepada

penjual air.

Ibu Reno bekerja sebagai penjual marus di sebuah pasar yang aktivitasnya terjadi saat subuh. Ia bekerja tujuh hari seminggu, berangkat bekerja pukul 12 tengah malam dan tiba di rumah pukul 7 pagi [terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha]. Segera setelah tiba di rumah, Ibu Reno langsung mengerjakan setumpuk pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan memasak [beban ganda perempuan: menanggung beban kerja di sektor publik dan domestik]. Kedua pekerjaan itu memakan waktu dan tenaga cukup besar karena minimnya alat pendukung dan pembagian kerja dalam rumah tangga yang timpang. Air harus ditimba dengan tangan dari sumur. Mencuci pakaian semua anggota keluarga melelahkan karena dilakukan tanpa bantuan apa pun atau siapa pun. Memasak memerlukan cukup banyak waktu karena hanya ada satu kompor minyak tanah yang sudah tua pula. Gangguan sama sekali tak terhindarkan karena sumur, kamar mandi (sekaligus tempat mencuci), dapur, toilet, dan sekaligus kandang ayam (dalam kotak kayu), kesemuanya terletak di dalam sebuah ruangan berukuran 3 m<sup>2</sup>, tanpa jendela, dengan lampu 10 watt yang menyala setiap saat, harus digunakan bersama dengan dua tetangga lain.

Beban yang ditanggung Ibu Reno semakin berat karena hanya sebagian kecil anggota keluarga yang ikut mengerjakan pekerjaan domestik. “Ibu *mah* punya banyak anak cuma *ngerjain* saja, maunya main terus. Ada juga yang kerja tapi uangnya buat seneng-senang sendiri”, ujarnya. Keluhan tersebut terutama ditujukan kepada anak-anak laki-laki yang telah dewasa dan bekerja. Hanya anak ke-2 perempuan yang

membantu Ibu Reno mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun, ia sendiri cukup sibuk mengasuh anaknya yang masih balita dan tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Akhirnya sebagian besar beban domestik dikerjakan sendiri oleh Ibu Reno [beban ganda perempuan], sejak pukul 07.00 hingga 13.00-14.00, dilanjutkan dengan makan siang dan istirahat. Ibu Reno berangkat tidur pada pukul 19.00-20.00, berangkat bekerja pukul 12.00 malam, tiba kembali di rumah pukul 07.00, demikian seterusnya. Beban kerja berlebih dan kelelahan kronis sering membuatnya emosional, sering mengeluh dan marah-marah.

Berjualan marus di pasar subuh menghasilkan keuntungan Rp 20.000 perhari. Jumlah tersebut digunakan untuk biaya makan dirinya sendiri, tujuh anak, dan seorang cucu. “Habis terus”, demikian komentarnya perihal penghasilannya. Penghasilan tersebut habis pada hari yang sama. Tiada hari libur bagi Ibu Reno, karena libur sama dengan tidak makan.

### ***Kasus 3: Ati***<sup>8</sup>

Salah seorang anak Ibu Reno (kasus 2) yang cukup intensif berinteraksi dengan penulis (saat penelitian lapangan) adalah anak pertama, Ati, yang tinggal terpisah. Ati tinggal di kampung yang berbeda bersama suami dan anaknya yang berusia 4 bulan. Suami Ati bekerja sebagai penjual koran di bis kota dan berpenghasilan Rp 5.000,00-10.000,00 perhari, dengan jam kerja pukul 6.00-20.00.

Ati dan anaknya bergantung sepenuhnya dari penghasilan suami yang menurutnya tidak mencukupi. Sebelum memiliki anak Ati bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan terpaksa berhenti setelah memiliki anak. Suatu saat dalam kondisi amat terdesak, Ati harus menjual tiga dari enam kain baik untuk menggendong bayi yang dimilikinya, seharga Rp 30.000,00 untuk membeli makanan. Namun, ini bukan kondisi terburuk sampai suatu hari penulis menemukan Ati terpaksa pulang ke rumah ibunya. “Saya tidak sanggup lagi ‘puasa’ lebih dari tiga hari,” demikian ujar Ati. Ternyata selama tiga hari Ati tidak makan apa pun, hanya minum, karena sama sekali tidak punya uang. Akibat “puasa” tersebut ASI-nya berhenti, dan selama tiga hari anaknya - bayi empat bulan – hanya minum air putih dicampur gula merah [terbatasnya kecukupan pangan dan mutu pangan]. Jarak rumah Ati dan ibunya sekitar 3 km, yang ditempuh dengan berjalan kaki, berhenti setiap sekitar lima langkah karena sakit kepala dan lemas. Ati tidak mampu menggunakan angkutan umum karena tidak punya uang.

Rumah Ati sendiri adalah rumah petak yang disewanya sebesar Rp 50.000,00 perbulan. Rumah tersebut berdinding bambu, berukuran 3 m<sup>2</sup>, tanpa jendela, dengan penerangan lampu 5 watt. Dinding bambu dan atap yang banyak berlubang di sana-sini ditambal dengan kardus dan kertas koran. “Kalau hujan deras pada bocor,” kata Ati. [terbatasnya akses layanan perumahan] MCK berupa kamar mandi dan WC kering

<sup>8)</sup> Bukan nama sebenarnya. Bersumber dari Indraswari, 2006:241-243, keterangan singkat dalam tanda kurung [ ] ditambahkan oleh penulis khusus untuk makalah ini.

digunakan bersama dengan beberapa tetangga. Disebut MCK kering karena tidak ada fasilitas air. Setiap pengguna MCK membawa air masing-masing.

Setiap hari Ati membeli tiga jerigen air dengan harga Rp 1.000,00 perjerigen untuk kebutuhan minum, mandi, dan mencuci. Ati membelanjakan Rp 3.000,00 perhari untuk membeli air atau sama dengan 30-60% dari total penghasilan keluarga sebesar Rp 5.000,00 – 10.000,00 perhari. “Ya harus dicukup-cukupin” ujar Ati tentang tiga jerigen air yang dibelinya. [terbatasnya akses terhadap air bersih/aman dan sanitasi]

Suatu hari menjelang magrib penulis menemukan Ati dan anaknya meminta maaf karena menerima kedatangan penulis dalam kondisi belum mandi. Keduanya menunggu suami dan ayah mereka pulang dan membawa uang untuk membeli air untuk mandi.

Masalah air membuat Ati (dan tetangga sekitar) jarang sekali memasak. Mereka lebih suka membeli makanan matang di warung dibandingkan memasak untuk konsumsi keluarga. Dalam situasi air relatif mahal dan sebagian besar (60%) penghasilan habis hanya untuk membeli air, memasak akan memakan biaya, waktu, dan tenaga lebih besar dibandingkan membeli makanan matang di warung. Bagi Ati membeli makanan matang adalah pilihan rasional karena memasak akan menghabiskan lebih banyak pendapatan karena membutuhkan air lebih dari yang telah ia belanjakan.

\*\*\*

Ketiga kasus Mak Eros, Ibu Reno, dan Ati adalah potret tiga perempuan miskin

yang harus menanggung beban kemiskinan sekaligus beban ketimpangan gender. Mak Eros harus bekerja keras mencari nafkah meskipun dalam kondisi hamil dan baru melahirkan. Ia pun masih harus menanggung beban domestik (memandikan anak dan memasak). Keterbatasannya dalam mencari nafkah sebagian disebabkan terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya pendidikan Mak Eros. Besar kemungkinan anak-anaknya – dengan bekal pendidikan minim dan tidak tercukupinya kebutuhan pangan berkualitas – akan mengikuti jejak kedua orang tuanya.

Kasus 2 dan 3 juga memperlihatkan beban berlebih yang ditanggung perempuan. Sama dengan Mak Eros, Ibu Reno dan anak seorang anak perempuannya masih terikat dengan setumpuk beban domestik. Ketimpangan dalam pembagian kerja domestik ternyata tidak hanya dihadapi pasangan suami istri. Ketimpangan tersebut berawal jauh dari keluarga *parental* yang membebaskan anak laki-laki dari pekerjaan domestik.

Dua kasus terakhir juga memperlihatkan rantai kemiskinan dari tiga generasi Ibu Reno, anak perempuannya Ati, dan anak Ati yang kemungkinan besar akan melanjutkan nasib ibunya kecuali jika mereka memperoleh intervensi yang mampu memutus rantai kemiskinan tersebut. Intervensi dalam bentuk pemenuhan hak dasar seperti hak atas pangan (bergizi), pendidikan, pekerjaan yang layak, rumah sehat, air bersih, dan sanitasi akan memberdayakan mereka dan memutus rantai kemiskinan. Tanpa intervensi tersebut besar kemungkinan anak Ati akan mengikuti jejak nenek dan ibunya. Tanpa pendidikan yang cukup dan gizi bu-

ruk saat balita, saat dewasa ia akan terjun dalam pekerjaan tak berketrampilan dengan tingkat kesejahteraan buruk dan akibatnya tetap terjatuh dalam rantai kemiskinan.

Secara umum ketiga kasus di atas memperlihatkan bahwa perempuan kurang berdaya, kurang kesempatan, kurang kemampuan, dan kurang keamanan (*women's lack of empowerment, opportunity, capacity and security*). Mak Eros, Ibu Reno, dan Ati adalah potret hidup dari data statistik ketimpangan gender di tingkat makro.

## Penutup

Data kuantitatif di tingkat makro dan data kualitatif di tingkat mikro mendukung pernyataan di awal makalah ini bahwasanya di kalangan orang miskin perempuan adalah kelompok termiskin dan mencerminkan kuatnya budaya patriarki yang menomorduakan perempuan.

Ketimpangan gender memperparah kemiskinan perempuan dan sebaliknya kemiskinan itu sendiri berkontribusi terhadap semakin tajamnya ketimpangan gender.

Sangat penting mengakomodasi masalah ketimpangan gender dalam penentuan kriteria kemiskinan. Wacana kemiskinan tidak dapat meniadakan masalah perbedaan pengalaman laki-laki dan perempuan miskin dan perbedaan kapasitas laki-laki dan perempuan dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, karena perempuan pada umumnya – miskin atau tidak miskin – sejak awal berangkat dengan “modal” (pendidikan, akses ekonomi, dll.) yang berbeda dari laki-laki.

Pada akhirnya program pengentasan kemiskinan juga penting mengakomodasi masalah ketimpangan gender dengan memberi perhatian, dan jika diperlukan, perlakuan khusus pada perempuan miskin.

## Daftar Rujukan

- Ardener, Shirley. 1964. 'The Comparative Study of Rotating Credit Associations', *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, Volume 94, Issue 2 (July – December, 1964), pp. 201-229, <http://links.jstor.org/sici?sici=0307-3114%28196407%2F12%2994%3A2%3C201%3ATCSORC%3E2.0.CO%3B2-O>, diakses tanggal 9 Mei 2003.
- Biro Pusat Statistik (BPS). TT. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2000-2004*. Jakarta.
- TT. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2004-2006*/Jakarta.
- Indraswari. 2006. *Women and Warung in an Urban Kampung*, *Disertasi Doktor*, Department of Anthropology, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, Canberra.
- 2006. "Myth of Male Breadwinner." *The Jakarta Post*, 14 Juli 2006.
- 2008. "Quota for women the first step." *The Jakarta Post*, 21 April 2008.
- Kabeer, Naila. 2003. "Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Millennium

- Development Goals – A Handbook for Policy Makers and Other Stakeholders,” Commonwealth Secretariat/IDRC/CIDA, URL: [http://www.idrc.ca/en/ev-42971-201-1-DO\\_TOPIC.html](http://www.idrc.ca/en/ev-42971-201-1-DO_TOPIC.html), diakses tanggal 10 Agustus 2008.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Biro Pusat Statistik (BPS)). 2007. *Indikator Pembangunan Berbasis Gender*. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). *Statistik Gender*, <http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=list&id=gender>, diakses tanggal 9 Agustus 2008.
- Muhtadi, Dedi. 2006. “Mak Eros Pernah Melahirkan 25 Kali.” *Kompas*, 8 Agustus 2008
- Razavi, Shahra. 2000. *Gendered Poverty and Well-being*. Oxford: Blackwell Publisher Ltd.
- Royat, Sujana. 2008. *Kebijakan, Strategi, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Kota dan penerbit???
- Tsai, Kellee S. 1998. “A Circle of Friends, A Web of Troubles: Rotating Credit Associations in China”, dalam *Culture & Society*, Magazine On line Volume 1, Number 1, <http://www.harvardchina.org/magazine/article/rotating%20credit.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2003.
- USAID Indonesia. TT. *Tantangan Indonesia Menyelamatkan Ibu dan Bayi Baru Lahir*.
- Whitehead, Ann. 2003. *Failing women, sustaining poverty: Gender in Poverty Reduction Strategy Papers*, Report for the UK Gender dan Development Network.
- World Bank. 2003. *Gender Equality and the Millennium Development Goals*, World Bank.